

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dan acuan dalam menyelesaikan penelitian ini, penelitian terdahulu dapat memudahkan penulis dalam menentukan langkah yang sistematis guna membantu penyusunan penulis.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Hasil penelitian
1.	Andi Adrie Arief (2018)	Partisipasi Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Takalar	Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah peran pemberdayaan yang dilakukan Komunitas Nelayan Berseri dibuat berdasarkan kesepakatan dan kebutuhan masyarakat, antara lain se bagai berikut : bentuk Partisipasi dalam kegiatan eksploitasi, berkaitan dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (mesin dan alat tangkap), Sedang partisipasinya dalam konservasi adalah kepedulian dalam menjaga wilayah perairan mereka dari kegiatan-kegiatan eksploitasi yang mempergunakan alat tangkap yang illegal/merusak (trowl, bom dan racun).
Perbedaan :			
a. Penelitian terdahulu dilakukan di masyarakat nelayan desa Tamasaju Kabupaten Takalar, sedangkan pada penelitian ini dilakukan di komunitas nelayan oncor desa Sapekan Kabupaten Sumenep.			
b. Peneliti terdahulu untuk mengetahui bentuk partisipasi nelayan dalam eksploitasi sumberdaya hayati perairan, sedangkan penelitian ini untuk			

mengetahui bentuk partisipasi komunitas nelayan oncor dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarganya			
2.	Ahmad Nurholis (2016)	Partisipasi Istri Nelayan Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir (Studi tentang Strategi Pengentasan Kemiskinan Keluarga Nelayan Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)	Berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui partisipasi istri nelayan dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir untuk upaya pengentasan kemiskinan di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi istri nelayan secara internal meliputi usia, pendidikan, lamanya tinggal dan faktor eksternal meliputi nelayan, juragan, pedagang ikan, pengolah ikan, pemasok ikan, pemerintah daerah. (2) Bentuk partisipasinya berupa uang, harta benda, tenaga dan keterampilan. (3) Tipe partisipasinya berupa partisipasi pasif, informatif, insentif, fungsional, dan mobilisasi diri. (4) Partisipasi dalam pemanfaatannya meliputi mengumpulkan, menyeleksi, mengolah, mengasinkan dan menjual. (5) Strategi pengentasan kemiskinan yang dikembangkan adalah menjemput produk olahan ikan asin ke pulau, mengolah buah mangrove menjadi sirup, mengolah jeruju menjadi peyek, mengolah alga menjadi obat, dan menanam sayuran.
Perbedaan :			
<p>a. Penelitian terdahulu dilakukan nelayan desa Margasari Kabupaten Lampung, sedangkan pada penelitian ini dilakukan di komunitas nelayan desa Sapekan Kabupaten Sumenep.</p> <p>b. Subyek dari penelitian terdahulu berfokus pada istri, sedangkan subyek dari penelitian ini berfokus pada keluarga nelayan.</p>			
3.	Annisya Rakha Anandhyta, Rilus A. Kinseng(2020)	Hubungan Tingkat Partisipasi dengan tingkat kesejahteraan dalam Pengembangan Wisata Pesisir	Hasil dari penelitian bertujuan untuk melihat hubungan antara tingkat partisipasi dengan tingkat kesejahteraan anggota Pokdarwis Baron Indah dalam pengembangan kawasan wisata Pantai Baron. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang didukung oleh data kualitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui

		<p>kuesioner dan data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam menggunakan panduan wawancara serta observasi lapang. Teknik dalam penentuan responden penelitian menggunakan <i>cluster accidental sampling</i>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anggota Pokdarwis Baron Indah berada pada tingkat partisipasi sedang. Penelitian ini juga menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara tingkat partisipasi dengan tingkat kesejahteraan.</p>
<p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Penelitian terdahulu dilakukan pada anggota Pokdarwis Baron Indah, sedangkan pada penelitian ini subyeknya adalah komunitas nelayan Desa Sapekan Kabupaten Sumenep. Pendekatan pada penelitian terdahulu ini dilakukan secara kuantitatif sedangkan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. 		

Sumber: Data diolah tahun 2023

B. Partisipasi

Partisipasi merupakan proses yang melibatkan masyarakat sebagai organisasi ataupun secara individu dalam sebuah pemerintah untuk memberikan kontribusi dalam proses pembuatan kebijakan perencanaan ataupun pelaksanaan kebijakan untuk kepentingan masyarakat agar kepentingan dan nilai mereka diwakil dari kebijakan tersebut (Farid dkk, 2020).

Menurut Paul (1987) mendefinisikan partisipasi sebagai suatu proses aktif dari kelompok penerima manfaat dalam mempengaruhi arah dan pelaksanaan proyek pembangunan dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, baik dalam hal pendapatan, pertumbuhan ekonomi pribadi, kepercayaan diri atau nilai-nilai lain yang mereka junjung tinggi.

1. Konsep Partisipasi

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris “*participation*” yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan (John M. Echols & Hasan Shadily, 2000).

Menurut Sundariningrum 2001, mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu :

- a. Partisipasi Langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.
- b. Partisipasi tidak langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.

Konsep partisipasi yang dikemukakan oleh Mardikanto T (2012), adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Masih menurut Totok Mardikanto dalam kamus Sosiologi Bomby mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari suatu kegiatan untuk memperoleh manfaat, menurut kamus sosiologi tersebut bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.

Menurut Atmanto 1995, mengemukakan 5 unsur penting dalam partisipasi yaitu:

- a. Komunitas yang menumbuhkan pengertian yang efektif
- b. Perubahan sikap, pendapat dan tingkah laku yang diakibatkan oleh pengertian yang menumbuhkan kesadaran
- c. Kesadaran yang didasarkan atas perhitungan dan pertimbangan
- d. Antusiasme atau spontanitas, yaitu kesediaan melakukan sesuatu yang tumbuh dari dalam lubuk hati sendiri tanpa dipaksa orang lain, dan
- e. Adanya rasa tanggungjawab terhadap kepentingan bersama. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan individu atau masyarakat baik secara fisik, material maupun non fisik untuk mengambil bagian dalam sebuah kegiatan atau perkumpulan baik secara bebas sukarela, spontan dengan pemahaman sendiri, maupun karena terinduksi oleh bujukan dan arahan dari pihak lain, dengan usaha-usaha ke arah pencapaian tujuan.

2. Bentuk Partisipasi

Partisipasi masyarakat dapat dikualifasikan/ dibedakan berdasarkan jenisnya yang antara lain (Davis dalam Sastropetro : 1988:16) :

- 1) Pikiran (*Psychological participation*)
- 2) Tenaga (*Physical Paticipation*)
- 3) Pikiran dan Tenaga (*Psychological dan Physical Paticipation*)

- 4) Keahlian (*Participation with skill*)
- 5) Barang (*Material Participation*)
- 6) Uang (*Money Participation*)

Menurut Basrowi yang dikutip Siti Irene Astuti D (2011), partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Partisipasi fisik

Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha sekolah.

b. Partisipasi non fisik

Partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

Sas-tropoetro (1988) juga menyebutkan beberapa bentuk partisipasi masyarakat, yaitu sebagai berikut:

a. Partisipasi fisik

Partisipasi ini melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang terkait dengan penggunaan fisik mereka, seperti membersihkan lingkungan atau membangun infrastruktur. Partisipasi fisik dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan memperkuat rasa kepemilikan terhadap lingkungan mereka.

b. Partisipasi keuangan

Partisipasi ini melibatkan masyarakat dalam memberikan sumbangan atau dana untuk proyek atau organisasi tertentu. Partisipasi keuangan dapat memberikan sumber daya tambahan untuk memperkuat program atau proyek yang dijalankan.

c. Partisipasi administratif

Partisipasi ini melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan administratif yang mempengaruhi hidup mereka, seperti dalam hal pemilihan kepala desa atau partisipasi dalam forum persetujuan anggaran. Partisipasi administratif dapat memperkuat tanggung jawab dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.

d. Partisipasi sosial

Partisipasi ini melibatkan masyarakat dalam kegiatan sosial yang terkait dengan lingkungan mereka, seperti forum diskusi atau pertemuan publik. Partisipasi sosial dapat meningkatkan komunikasi antara masyarakat dan menghasilkan solusi yang lebih efektif untuk masalah yang dihadapi.

3. Faktor Mempengaruhi Partisipasi

Partisipasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut Pangesti (1995) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi, yaitu:

- a. Faktor internal, mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu

kegiatan. Karakteristik individu mencakup umur, tingkat pendidikan jumlah beban keluarga, jumlah pendapatan, pengalaman berkelompok.

- b. Faktor eksternal, meliputi hubungan yang terjalin antara Pihak pengelola proyek dengan sasaran yang dapat mempengaruhi partisipasi karena sasaran akan dengan sukarela terlibat dalam suatu proyek, jika sambutan pihak pengelola positif dan menguntungkan mereka. Selain itu bila didukung dengan pelayanan pengelola kegiatan yang positif dan tepat dibutuhkan oleh sasaran, maka sasaran tersebut tidak akan ragu untuk berpartisipasi dalam proyek. Selain itu ada juga faktor yang menghambat partisipasi masyarakat menurut Watson dalam Soetomo (2006) mengatakan bahwa ada beberapa kendala (hambatan) yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan antara lain kendala yang berasal dari kepribadian individu salah satunya adalah ketergantungan. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan hambatan dalam mewujudkan partisipasi atau keterlibatan masyarakat secara aktif, karena rasa ketergantungan ini masyarakat tidak memiliki inisiatif untuk melaksanakan pembangunan atau prakarsa mereka sendiri.

Menurut Plumer dalam Yulianti (2012) ada faktor-faktor yang akan mempengaruhi suatu masyarakat ikut serta atau berpartisipasi sebagai berikut:

a. Pengetahuan dan keahlian

Dasar dari pemikiran masyarakat yang dimiliki akan berdampak kepada seluruh lingkungannya. batas kemampuan dan pemikiran masyarakat tersebut mereka dapat mengetahui proses proses dari suatu program yang ada agar mereka dapat berpartisipasi.

b. Pekerjaan masyarakat.

Jenis pekerjaan suatu masyarakat akan mempengaruhi cara pandang suatu kelompok kerja, gimana ini akan menjadi hal dasar bagi masyarakat dalam rangka ikut serta dalam suatu program karena berbagai hal yang berbeda dan perbedaan kepentingan.

c. Tingkat pendidikan

Ini sangat memiliki andil yang besar dan berdampak kepada keinginan dari suatu masyarakat untuk ikut serta karena akan mempengaruhi cara pandang masyarakat untuk melihat program yang akan dijalankan.

d. Jenis kelamin

Merupakan hal yang cukup mendasar dari sebuah keikutsertaan dari suatu program karena keinginan ataupun kemampuan dari masyarakat untuk ikut serta akan *anne-marie* dari jenis kelaminnya

karena akan mempengaruhi persepsi yang berbeda dari suatu permasalahan

e. Kepercayaan terhadap budaya tertentu

Masyarakat sosial masyarakat yang memiliki dasar-dasar normal ataupun budaya yang mengikat yang lahir dan mengakar di tubuh masyarakat tersebut, ini akan mempengaruhi tindakan dan perilaku masyarakat tersebut dalam melihat memandang dari suatu program yang mereka ikut berpartisipasi. Jadi partisipasi lain itu merupakan pilihan dari tindakan dari keikutsertaan lain ataupun masyarakat nelayan dalam bentuk komunitas atau bentuk yang lain yang mengajak orang lain untuk ambil peran dalam mencapai tujuan kelompok lain serta pengambilan tanggung jawab.

C. **Komunitas**

Komunitas atau organisasi merupakan bentuk kerjasama antara beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan dengan mengadakan pembagian dan peraturan kerja. Organisasi mempunyai dua prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu : bertahan hidup (*survive*), dan berkembang (*develop*). Organisasi harus dapat mempertahankan keberadaannya dan berkembang, kalau tidak organisasi itu akan bangkrut atau gulung tikar. Atas dua prinsip itulah maka teknik pengorganisasian diperlukan dalam mempertahankan keberadaannya. (Imam Moedjiono, 2002).

Dalam meraih tujuan yang hendak dicapai orang membentuk organisasi sesuai dengan minatnya, bagi mereka yang berminat dalam dakwah tergabung

dalam organisasi dakwah demikian hanya orang peduli pada kesejahteraan sosial membentuk organisasi kesejahteraan sosial. Organisasi pelayanan kemanusiaan (OPK) atau *Human Service Organization* adalah organisasi yang fokus utamanya memberi pelayanan sosial. Organisasi semacam ini memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan organisasi lainnya. Pekerja sosial karenanya harus mengerti kekhasan agar dapat melakukan pembangunan secara efektif. (Suharto, 2009).

Bila membahas tentang intervensi komunitas, ada satu istilah yang biasanya muncul pada pembahasan tersebut, yaitu siapa yang biasanya muncul pada pembahasan tersebut. komunitas menurut Mayo yang dikutip oleh Isbandi Rukminto Adi, mempunyai tiga tingkatan diantaranya (Isbandi, 2013).

1. *Gras root* (pelaku perubahan melakukan intervensi terhadap kelompok masyarakat yang berada di daerah tersebut, misalnya dalam suatu Kelurahan ataupun Rukun tetangga).
2. *Local Agency* dan *inter – agency work* (pelaku perubahan melakukan intervensi terhadap organisasi paling tingkat lokal, provinsi ataupun di tingkat lebih luas, bersama jajaran pemerintahan yang terkait serta organisasi non pemerintah yang berminat terhadap hal tersebut).
3. *Regional* dan *national community planning work* (misalnya, pelaku perubahan melakukan intervensi pada isu yang terkait dengan pembangunan ekonomi maupun isu mengenai perencanaan lingkungan yang mempunyai cakupan lebih luas dari bahasa di tingkat lokal).

Pada perkembangannya, banyak upaya pengembangan komunitas (*community development*) yang mengambil strategi pemberdayaan sebagai pendekatan utamanya. Pendekatan ini menganalogikan komunitas sebagaimana layaknya kesatuan “tubuh manusia” yang bisa mengalami perubahan, bergerak, berkembang, dan bahkan memiliki energi dan kekuatan dari dalam untuk berubah. Pemaknaan konsep komunitas dengan mengasosiasikannya ibarat tubuh manusia itu, diinspirasi oleh pandangan yang menganggap komunitas sebagai sebuah lapangan sosial (*social field*). Menurut Wikinson (1972), sebagai sebuah lapangan sosial, komunitas bersama-sama dengan bentuk-bentuk organisasi sosial lainnya, seperti kelompok sosial (*social group*) dan organisasi, memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Ada proses atau interaksi sosial yang berlangsung secara kontinu di dalamnya. Dinamika interaksi sosial ini menandakan bahwa ada kehidupan yang berarti dalam sistem komunitas itu.
2. Ada arah perubahan ke suatu titik tertentu (*there is a direction toward some more or less distinctive outcome*). Artinya, komunitas tidak statis berada di satu titik dan tak pernah beranjak untuk berubah.
3. Ada perubahan atau perkembangan yang berlangsung secara teratur atas elemen dan struktur pembentuknya.

Bentuk pemberdayaan komunitas secara umum dapat dibedakan ke dalam tiga (3) bentuk yaitu:

- a. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau seringkali dikenal dengan istilah PNPM Mandiri merupakan salah satu jenis pemberdayaan komunitas yang bertujuan untuk percepatan penanggulangan masalah- masalah terkait kemiskinan serta perluasan lapangan pekerjaan. PNPM Mandiri secara mendasar dalam pelaksanaannya menggunakan mekanisme, sistem, dan tata aturan yang berkembang. Program PNPM ini memberikan pelayanan – pelayanan terkait dengan contoh pemberdayaan masyarakat atau kelembagaan dalam lingkup lokal, yang meliputi pendampingan, pelatihan, dan juga adanya Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat yang diberikan secara langsung.

b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat atau dikenal dengan istilah LSM, merupakan jenis pemberdayaan komunitas yang berfokus pada kegiatan pelayanan publik atau masyarakat umum atas dasar asas sukarela serta tidak berorientasi mencari keuntungan. Pada dasarnya, LSM ini didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang dengan berlandaskan visi dan misi yang memiliki kesamaan. Lembaga ini merupakan lembaga non pemerintahan atau secara mendasar tidak terikat oleh negara. LSM memiliki empat 4 klasifikasi yaitu organisasi penyalur sumbangan, organisasi sehubungan dengan mitra pemerintah, organisasi dalam bidang profesional, dan organisasi yang berlawanan atau berkebalikan.

c. Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK)

Jenis pemberdayaan komunitas ini merupakan upaya Pemerintah dalam bentuk pembangunan pada bidang pembangunan sosial dan ekonomi, serta lingkungan dalam lingkup penanggulangan kemiskinan. Pada PLPBK secara khusus menekankan dalam aspek pembangunan lingkungan sosial yang kondusif dalam perspektif spiritual maupun material. Prinsip dasar yang terkonstruksikan dalam PLPBK ini adalah kebebasan, keikutsertaan, keterbukaan, pemerataan serta tanggung jawab.

Nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal didesa-desa atau pesisir. Ciri komunitas nelayan dapat dilihat dari berbagai segi. Sebagai berikut :

- a. Dari segi mata pencaharian. Nelayan adalah mereka yang segala aktivitasnya berkaitan dengan lingkungan laut dan pesisir. Atau mereka yang menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian.
- b. Dari segi cara hidup. Komunitas adalah komunitas gotong royong, kebutuhan gotong royong dan tolong menolong sangat penting pada saat untuk mengatasi keadaan yang menuntut pengeluaran biaya besar dan pengerahan tenaga yang banyak. Seperti saat berlayar. Membangun rumah atau tanggul penahan gelombang di sekitar desa.
- c. Dari segi keterampilan. Meskipun pekerjaan nelayan adalah pekerjaan berat namun pada umumnya mereka memiliki ketrampilan sederhana. Kebanyakan mereka bekerja sebagai nelayan adalah profesi yang diturunkan oleh orang tua. Bukan dipelajari secara professional. Dari

bangunan struktur sosial, komunitas nelayan terdiri atas komunitas yang heterogen dan homogen. Masyarakat yang heterogen adalah mereka yang bermukim di desa-desa yang mudah dijangkau oleh transportasi darat. Sedangkan yang homogen terdapat di desa-desa nelayan terpencil yang sulit terjangkau oleh transportasi darat. (Sastrawidjaya, 2002).

D. Masyarakat Nelayan

Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang tinggal di pesisir pantai dan menggantung hidup mereka di laut, Masalah yang terjadi pada masyarakat nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial (Suharto, 2005). Menurut Syarief (2001) menggolongkan masyarakat tersebut pun ke dalam beberapakelompok, antara lain:

- a. Masyarakat nelayan tangkap, merupakan kelompok masyarakat pesisir yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan dilaut. Kelompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitunelayan tangkap modern dan nelayan tangkap tradisional. Keduanyakelompok ini dapat dibedakan dari jenis kapal/peralatan yangdigunakan dan jangkauan wilayah tangkapannya.
- b. Masyarakat nelayan pengumpul (bakul), merupakan kelompok masyarakat pesisir yang bekerja disekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Mereka akan mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan baik melalui pelelangan maupun dari sisa ikan yang

tidak terlelang yang selanjutnya dijual ke masyarakat sekitarnya atau dibawah ke pasar-pasar lokal. Umumnya yang menjadi pengumpul ini adalah kelompok masyarakat pesisir perempuan.

- c. Masyarakat nelayan buruh, merupakan kelompok masyarakat nelayan yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat pesisir. Ciri dari mereka dapat terlihat dari kemiskinan yang selalumembelenggu kehidupan mereka, mereka tidak memiliki modal atau peralatan yang memadai untuk usaha produktif. Umumnya mereka bekerja sebagai buruh/anak buah kapal (ABK) pada kapal-kapal juragan dengan penghasilan yang minim.
- d. Masyarakat nelayan tambak, merupakan masyarakat nelayan pengolah, dan kelompok masyarakat nelayan buruh. Jika digolongkan berdasarkan tipe di atas, Indonesia masih didominasi oleh masyarakat nelayan tangkap tradisional dan dalam pelaksanaannya, masih terdapat nelayan buruh yang merupakan sekelompok nelayan tangkap yang belum memiliki modal sehingga harus ikut bersama nelayan lain yang sudah memiliki alat tangkap serta perahu.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia nelayan merupakan jawaban atas sebagian persoalan di sektor penangkapan. Fokus pada aspek ini didasari oleh pertimbangan pemikiran sebagai berikut. Pertama, aspek sumberdaya manusia merupakan unsur terpenting dari sebuah organisasi ekonomi. Aspek ini menjadi penentu keberhasilan dan kegagalan dari sebuah kegiatan ekonomi. Kedua,

nelayan adalah berposisi sebagai produsen hasil laut. Keberhasilan usaha nelayan akan menentukan secara signifikan aktivitas ekonomi di sektor pengolahan dan pemasaran, karena itu, jika musim barat tiba (Desember-Februari) dan nelayan tidak melaut, maka hasil tangkapan menurun drastis, sehingga aktivitas ekonomi di sektor pengolahan dan pemasaran juga menjadi lumpuh. (Kusnadi, 2013).

Kondisi lain yang turut memperburuk tingkat kesejahteraan nelayan adalah mengenai kebiasaan atau pola hidup. Tidak sepantasnya jika mengatakan nelayan pemalas, karena jika dilihat dari daur hidup nelayan yang selalu bekerja keras. kendalanya adalah pola hidup konsumtif, dimana pada saat penghasilan banyak, tidak ditabung untuk persiapan paceklik, melainkan dijadikan kesempatan untuk membeli kebutuhan sekunder

Dalam setiap kelompok sosial selalu ada benih-benih pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu atau kelompok dengan pemerintah. Pertentangan ini biasanya berbentuk non fisik. Tetapi dapat berkembang menjadi benturan fisik, kekerasan dan tidak berbentuk kekerasan. Konflik merupakan fenomena yang terjadi sejak dulu yang terjadi pada setiap masyarakat manapun, termasuk dalam hal ini adalah masyarakat nelayan, kualitas sumberdaya manusia yang rendah merupakan ciri umum nelayan-nelayan, utamanya nelayan tradisional di berbagai wilayah perairan Indonesia (Sriwahyuni, 2018).

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat nelayan menurut Kusnadi (2008) terdapat lima masalah pokok antara lain :

1. Kondisi Alam. Kompleksnya permasalahan pada masyarakat nelayan terjadi disebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras yang selalu diliputi ketidakpastian dalam menjalankan usahanya.
2. Tingkat pendidikan nelayan. Nelayan yang miskin umumnya belum banyak tersentuh teknologi modern, kualitas sumberdaya manusia rendah dan tingkat produktivitas tangkapannya juga sangat rendah.
3. Pola kehidupan nelayan. Pola hidup konsumtif menjadi masalah laten pada masyarakat nelayan, dimana pada saat penghasilan banyak, tidak ditabung untuk persiapan paceklik, melainkan dijadikan kesempatan untuk membeli kebutuhan sekunder.
4. Pemasaran hasil tangkapan. Tidak semua daerah pesisir memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Hal tersebut membuat para nelayan terpaksa untuk menjual hasil tangkapan mereka kepada tengkulak dengan harga di bawah harga pasar.
5. Program pemerintah yang belum memihak pada masyarakat nelayan.

Konflik antar masyarakat nelayan biasanya terkait dengan perselisihan penggunaan alat tangkap ikan. Konflik ini sangat sering terjadi terutama sejak ada isu bahwa alat tangkap ikan berupa arad, cantrang dan trol akan dilarang penggunaannya oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan. Hal ini dikarenakan ketiga alat tangkap ikan tersebut merusak ekosistem laut. Jika terus digunakan otomatis jumlah ikan akan semakin berkurang karena habitat mereka akan

rusak. Meskipun telah dilarang digunakan, namun beberapa oknum masih saja ada yang tetap menggunakan alat tangkap tersebut. Bagi para nelayan tradisional dan nelayan-nelayan yang telah mentaati peraturan, hal ini tentu sangat merugikan. Hal ini seringkali menjadi pemicu konflik antar nelayan di tengah laut (Soni Akhmad dkk, 2017).

Menurut Kusnadi (2003) bahwa secara umum salah satu penyebab munculnya konflik masyarakat nelayan berawal dari keleluasaan mengeksploitasi sumberdaya perikanan merupakan konsekuensi kepemilikan yang bersifat *open access*, dengan demikian maka tidak jarang menimbulkan suatu konflik dan terlebih lagi terjadi suatu ketimpangan dalam akses antara kelompok nelayan kecil dan kelompok nelayan besar.

Seperti yang telah diteliti oleh Kusnadi (2002) terhadap nelayan di sepanjang Pesisir Utara Jawa Timur, dimana diungkapkan olehnya bahwa sering terjadinya konflik antara nelayan karena adanya perebutan sumberdaya perikanan. Banyak nelayan pendatang yang melakukan penangkapan ikan di luar wilayahnya sehingga membuat marah para nelayan lokal.

E. Kesejahteraan Keluarga

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan social, material, maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial

yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat (Rambe, 2001 dalam Sunarti, 2006).

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. (UU RI Nomor 52 tahun 2009).

Di dalam rangka membangun keluarga sejahtera yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram dan harapan masa depan yang baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin, maka suami dan isteri harus melaksanakan peranan atau fungsi sesuai dengan kedudukannya. Dengan demikian, keluarga akan merupakan suatu unit terkecil dalam masyarakat yang bukan hanya berfungsi sosial budaya, tetapi juga berfungsi ekonomi. Apabila tekanan fungsi keluarga secara tradisional adalah fungsi reproduktif yang dari generasi ke generasi mengulangi fungsi yang sama, kemudian telah berkembang ke fungsi sosial budaya. Namun, belakangan ini keluarga diandalkan untuk suatu tugas yang lebih luhur yaitu, sebagai wahana mencapai tujuan pembangunan. Hal ini menyebabkan keluarga perlu mempersiapkan diri dalam keterlibatannya sebagai agen pembangunan di sektor ekonomi produktif (Achir, 1994).

Menurut Soetjipto (1992), kesejahteraan keluarga adalah terciptanya suatu keadaan yang harmonis dan terpenuhinya kebutuhan jasmani serta sosial bagi anggota keluarga, tanpa mengalami hambatan yang serius di dalam keluarga,

dan dalam menghadapi masalah-masalah keluarga akan mudah untuk di atasi secara bersama oleh anggota keluarga, sehingga standar kehidupan keluarga dapat terwujud. Konsepsi tersebut mengandung arti bahwa, kesejahteraan keluarga adalah suatu kondisi yang harus diciptakan oleh keluarga dalam membentuk keluarga yang sejahtera. Adapun keluarga sejahtera merupakan model yang dihasilkan dari usaha kesejahteraan keluarga.

1. Konsep Kesejahteraan Keluarga

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1993) dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu:

- a. Rasa Aman
- b. Kesejahteraan
- c. Kebebasan
- d. Jati diri

Badan Pusat Statistik Indonesia (2000) menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah:

1. Tingkat pendapatan keluarga
2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan
3. Tingkat pendidikan keluarga
4. Tingkat kesehatan keluarga, dan

5. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Menurut Kolle (1974) dalam Bintarto (1989), kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan antara lain:

- a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya;
 - b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya;
 - c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya.
 - d. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.
2. Fungsi Kesejahteraan Keluarga

Fungsi kesejahteraan keluarga terdiri dari :

- a. Fungsi keagamaan

Agama adalah kebutuhan dasar bagi setiap manusia yang ada sejak dalam kandungan. Dalam keluarga sejahtera, keluarga dan anggotanya mau dan mampu mengembangkan kehidupan keluarga sebagai wahana untuk menanamkan nilai agama dan nilai luhur budaya bangsa, yang akan menjadikan manusia yang agamis, penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- b. Fungsi sosial budaya

Manusia adalah makhluk sosial. Ia bukan hanya membutuhkan orang lain. Setiap keluarga tinggal disuatu daerah dengan memiliki kebudayaan sendiri. Keluarga sebagian dari masyarakat diharapkan mampu menggali, mempertahankan dan mengembangkan sosial budaya setempat. Disamping itu keluarga juga mampu menanamkan rasa memiliki terhadap budaya daerahnya tetapi berlebih-berlebihan, sehingga ia mampu menghargai berbagai budaya harus dijadikan rahmat bukan dijadikan bahan ejekan yang menyebabkan terjadinya permusuhan dan perpecahan

c. Fungsi cinta dan kasih sayang

Mendapatkan cinta dan kasih sayang adalah hak anak dan kewajiban orang tua untuk memenuhinya. Dengan kasih sayang orang tua, anak belajar bukan hanya menyayangi yang lainya tetapi belajar menghargai orang lain. Membimbing dan mendidik anak dengan penuh cinta kasih akan membuat anak berkembang menjadi anak yang lembut, penuh kasih sayang dan bijaksana sehingga tercipta keharmonisan.

d. Fungsi perlindungan

Keluarga mempunyai fungsi sebagai tempat berlindung bagi anggota keluarga. Dalam hal ini dimaksudkan keluarga harus memberikan rasa aman, tenang dan tentram bagi anggota keluarganya. Dalam ajaran islam bahwasalah satu tujuan pernikahan adalah diperolehnya rasa aman, tenang dan tentram.

e. Fungsi reproduksi.

Salah satu tujuan perkawinan adalah melestarikan keturunan, karena itu perkembangan suatu keturunan bagi suatu keluarga akan mengurangi kebahagiaan bahkan menjadi sebab penderitaan batin bagi keluarga. Keluarga sejahtera dapat melaksanakan mekanisme untuk melanjutkan keturunan sesuai dengan rencana dan dapat terciptanya kesejahteraan manusia di dunia yang penuh iman dan taqwa.

f. Fungsi sosialisasi dan pendidikan.

Orang tua adalah menpendidik pertama dan utama bagi anaknya. Keluarga diharapkan mampu menumbuhkan dan mengembangkan kekuatan fisik, mental, sosial dan spiritual secara serasi dan selaras serta seimbang. Orang tua bertanggung jawab dan akan menjadi contoh, pemberi inisiatif dan mendorong bagi anak dalam menerapkan nilai kebaikan, kebenaran dan kemanusiaan.

g. Fungsi ekonomi

Pemenuhan kebutuhan berupa sandang pangan dan papan adalah kewajiban setiap orang tua, tetapi selain itu adalah bagaimana mendorong anggota keluarganya untuk dapat hidup sederhana tidak berlebihan-lebihan sehingga anak dapat menghargai setiap jerih payah yang telah dilakukan orang tuanya.

h. Fungsi lingkungan

Kemampuan keluarga dalam pelestarian lingkungan merupakan langkah yang positif. Penempatan untuk keluarga sejahtera dalam lingkungan sosial budaya dan lingkungan alam yang dinamis secara

serasi, selaras dan seimbang. Upaya pengembangan fungsi keluarga ini dimaksud sebagai wahana bagi keluarga agar dapat mengaplikasikan diri dalam membangun dirinya menjadi keluarga sejahtera dengan difasilitasi oleh institusi masyarakat sebagai lingkuang sosialnya dan dukungan dari pemerintah. (BKKBN, 1996)

3. Faktor Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga

Menurut Walter A. Friedlander faktor-faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dibagi kepada bidang-bidang antaranya :

- a. Bidang yang terkait dengan sistem penyampaian layanan (layanan yang ditawarkan oleh lembaga pemerintah baik ditingkat pusat, provinsi maupun lokal).
- b. Bidang yang terkait dengan pendidikan.

Adapun menurut Charles zastrow keterampilan juga mempunyai kaitan dalam hal kesejahteraan sosial. Sedangkan menurut mulyadi, 2007. Adanya akses terhadap modal merupakan salah satu faktor yang dapat mengatasi kemiskinan yang berarti dapat meningkatkan kesejahteraan.

1. Pendidikan

Nelayan yang miskin umumnya belum banyak tersentuh teknologi modern, kualitas sumber daya rendah dan tingkat produktivitas hasil tangkapannya juga sangat rendah. Tingkat pendidikan nelayan berbanding lurus dengan teknologi yang dapat dihasilkan oleh para nelayan. Dalam hal ini teknologi dibidang penangkapan dan pengawetan ikan. Karna selama ini nelayan hanya menggunakan cara yang

tradisional untuk mengawetkan ikan. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan penguasaan nelayan terhadap teknologi.

2. Keterampilan

Secara definitif, keterampilan dapat didefinisikan sebagai kemampuan, keahlian atau kemahiran yang diperoleh dari praktek dan pengetahuan. Salah satu faktor untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah direncanakan adalah ketrampilan, keahlian atau kepandaian (*skill*) yang berpangkal kepada pendayagunaan daya pikiran. Misalnya dalam lapangan industri merubah bahan mentah menjadi bahan jadi yang siap digunakan sesuai selera konsumen. Dalam kegiatan itu ditemukan banyak problema yang hanya mungkin dipecahkan dengan *skill*, baik dalam bentuk tehnikal *skill*, managerial *skill*, keahlian mengelola usaha maupun *skill* baik dalam bentuk dan memasarkan barang-barang produksi.

3. Modal

Nilai asset (Inventaris tetap tidak bergerak dalam satu unit penangkap disebut juga sebagai modal menurut Drs Moekijat mengatakan modal merupakan asset baik berupa barang barang atau dana yang dijadikan sebagai pokok untuk menjalankan usaha atau bisnis karena sejatinya modal adalah pondasi dalam menjalankan usaha. Pada umumnya, untuk satu unit penangkap modal terdiri dari: alat-alat penangkap (pukat dan lain-lain), boat atau sampan penangkap, alat-

alat pengelolaan atau pengawet didalam kapal, dan alat-alat pengangkutan laut. Dengan adanya bermacam-macam alat penangkap dan tingkatan-tingkatan kemajuan nelayan, banyaknya alat-alat tersebut pada tiap-tiap unit penangkapan tidak sama. Unit penangkapan modern seperti peti es. Sedangkan alat-alat penangkap sederhana hanya mempunyai satu sampan kecil dengan atau pukat jarring (Abdurrahman, 2006).

Untuk mengatasi kesulitan modal, masyarakat nelayan disarankan untuk mengembangkan suatu mekanisme tersendiri, yaitu sistem modal bersama (*capita sharing*). Sistem ini memungkinkan terjadinya kerja sama diantara nelayan dalam pengadaan modal, juga menunjukkan terjadinya “pemerataan resiko” karena kerugian besar yang dapat terjadi setiap saat, seperti perahu atau rusaknya alat tangkap, akan dapat ditanggung bersama.

Untuk menumbuhkembangkan usaha kecil masyarakat pesisir paling tidak ada lima pendekatan yaitu: (Mulyadi, 2007) ★

- a. Mendekatkan masyarakat dengan sumber modal pada penciptaan mekanisme pada diri sendiri
- b. Penciptaan lapangan kerja alternative sebagai sumber pendapatan lain bagi keluarga
- c. Mendekatkan masyarakat dengan sumber teknologi baru yang lebih berhasil dan berdaya guna
- d. Mendekatkan masyarakat dengan pasar
- e. Membangun solidaritas serta aksi kolektif ditengah masyarakat.

f. Dukungan Pemerintah

Pemerintah harus lebih mendekatkan diri kepada masyarakat nelayan karena kedudukannya sebagai abdi masyarakat sisa ketidakpercayaan masyarakat nelayan terhadap pemerintah masih tetap ada. Jika pemerintah tidak tanggap terhadap aspirasi masyarakat nelayan dan kesenjangan hubungan fungsional masih terus berjalan, niscaya kebijakan-kebijakan pembangunan kawasan dan masyarakat pesisir yang digagas pemerintah tidak akan bisa berjalan dengan baik, karena rendahnya dukungan masyarakat nelayan.

Pemerintah harus turut mempunyai peranan penting dalam program tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ihsannudin dan Liony Wijayanti (2013) bahwa terdapat 45 strategi pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil. Strategi pemerintah tersebut merupakan kebijakan yang bersifat perbaikan manajemen sistem klaster nelayan daerah pesisir serta program-program yang direncanakan tersebut menjadi tidak ada berarti bila tidak didukung dengan kebijakan pemerintah di level makro, seperti harga BBM (Liony Wijayanti dan Ihsannudin, 2013).

Dukungan pemerintah dan pihak lain sangat dibutuhkan karena kelemahan utama nelayan Indonesia dibanding nelayan bangsa lain adalah masalah pemanfaatan teknologi, akses informasi mengenai titik-titik keberadaan ikan tidak dimiliki oleh nelayan, sehingga jumlah tangkapan nelayan selalu terbatas. Nelayan perlu dididikasi untuk mampu memahami

sistem teknologi satelit atau GPS, setidaknya walaupun tidak mampu menggunakan teknologinya nelayan dibukakan akses informasi (Mulyadi,2007).

4. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

Upaya peningkatan kesejahteraan Salah satu bidang pekerjaan yang memiliki potensi besar untuk digarap dan dikembangkan adalah kelautan, maritim atau perhubungan laut. Kebutuhan ini terasa sekali dikawasan yang terdiri atas banyak pulau, seperti Indonesia ini. Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat kompleks dan multidimensional, baik dilihat dari aspek cultural maupun aspek structural. Ada empat masalah pokok yang menjadi penyebab dari kemiskinan, yaitu kurangnya kesempatan rendahnya kemampuan, kurangnya jaminan dan keterbatasan hak-hak sosial, ekonomi dan politik sehingga menyebabkan kerentanan, keterpurukan, dan ketidakberdayaan dalam segala bidang.

Contoh dari keempat hal tersebut dapat dilihat dari masalah kemiskinan structural yang terjadi pada masyarakat pantai, dimana faktor - faktor yang menjadi penyebabnya pada dasarnya dikelompokan atas :

- a. Masalah yang berkaitan dengan kepemilikan alat tangkap atau lebih tugasnya perahu bermotor
- b. Akses terhadap modal khususnya menyangkut persyaratan kredit
- c. Persyaratan pertukaran hasil tangkap yang tida berpihak pada buruh nelayan

- d. Sarana penyimpanan ikan
- e. Hak pengusaan kawasan tangkap
- f. Perusakan sistem organisasi masyarakat pesisir (Mulyadi, 2007).

